

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Desa Tambak Anyar Ilir

Desa Tambak Anyar Ilir yang berada di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, terletak pada daerah rawa atau dekat dengan sungai, terdiri dari tiga Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Masyarakat desa tambak anyar ilir sebanyak 1.893 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 970 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan 923 jiwa. Titik berbatasan desa tersebut yaitu wilayah Selatan (Desa Antasan Senor), Utara (Desa Tambak Anyar), Barat (Desa Pematang Baru) semua berada di zona Kecamatan Martapura Timur hanya satu yang berbeda yaitu wilayah Timur (Desa Tambak Baru) yang berada dikecamatan Martapura. Berikut Adalah data demografis Pekerjaan penduduk Desa Tambak Anyar Ilir.

Tabel 4.1
Data Demografis Pekerjaan Penduduk Desa Tambak Anyar Ilir

No	Pekerjaan	Jumlah Masyarakat
1.	Pengurus rumah tangga	493 jiwa
2.	Tidak atau belum bekerja	654 jiwa
3.	Pelajar dan mahasiswa	138 jiwa
4.	Wiraswasta	100 jiwa
5.	Buruh harian lepas	188 jiwa
6.	Pegawai negeri sipil (PNS)	17 jiwa
7.	Karyawan swasta	48 jiwa

Sumber, infografis desa tambak anyar ilir

2. Daftar Pangkalan/Sub Penyalur di Desa Tambak Anyar Ilir

Jumlah pangkalan di Desa Tambak Anyar Ilir yaitu berjumlah 7 pangkalan yang dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Daftar Pangkalan Gas LPG 3 Kg Didesa Tambak Anyar Ilir

No.	Pangkalan	Alamat
1.	H. Samsuni	Tambak Anyar Ilir Rt.01
2.	Badrudin	Tambak Anyar Ilir Rt.02
3.	Ahmad Syarkani	Tambak Anyar Ilir Rt.02
4.	Guru Juchran	Tambak Anyar Ilir Rt.02
5.	Imuh	Tambak Anyar Ilir Rt.03
6.	Husaini	Tambak Anyar Ilir Rt.03
7.	Andre Hermawan	Tambak Anyar Ilir Rt.03

Sumber, Kepala desa tambak anyar ilir.

3. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara secara langsung kepada masyarakat desa, pengelola pangkalan gas LPG 3 kg, dan aparat desa. Wawancara dilakukan kepada 9 masyarakat yang terbagi dari 3 masyarakat Rt.01, 3 masyarakat Rt.02, dan 3 masyarakat Rt.3, selain itu wawancara juga dilakukan pada 1 pangkalan yang ada di Desa Tambak Anyar Ilir, dan 1 aparat desa,

a. Informan 1 Khadizah, Desa Tambak Anyar Ilir, Rt.1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Khadizah, seorang ibu rumah tangga yang menjadi penerima aktif LPG 3 kg di RT 1 Desa Tambak Anyar Ilir, yaitu Khadizah yang merupakan warga Desa

Tambak Anyar Ilir, diperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap penyaluran gas LPG 3 kg yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Hasil wawancara Ibu Khadijah menyebutkan bahwa:

"Saya paham program LPG 3 kg ini kebijakan pemerintah buat bantu ringanin beban ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Pake KTP atau NIK pas beli gas juga bagus, biar data penerima subsidi bisa ketahuan dengan jelas sama pemerintah."

Informan memahami bahwa program LPG 3 kg merupakan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu. Selain itu, penerapan penggunaan KTP atau NIK dalam pembelian gas dipandang sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa data penerima subsidi dapat teridentifikasi dengan lebih baik.

Hasil wawancara Ibu Khadijah menyebutkan bahwa:

"Penyaluran Gas LPG 3 Kg belum tepat sasaran karena masih banyak Masyarakat yang tergolong mampu juga ikut membeli Gas LPG 3 Kg dan kadang-kadang dari pengecer juga ikut membeli (Borongan) kepangkalan"

Namun, dalam praktiknya, informan menilai bahwa penyaluran gas LPG 3 kg masih belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Meskipun secara aturan gas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pada kenyataannya masih banyak pihak darikalangan ekonomi menengah ke atas yang ikut membeli. Bahkan, adanya pembelian dalam jumlah besar oleh pengecer turut memperparah kondisi tersebut, sehingga distribusi

menjadi tidak merata dan cenderung tidak adil bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menurut persepsi Ibu Khadizah, Ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran tersebut:

1) Faktor Teknis dan Operasional

informan memberikan penilaian terhadap sistem dan pengawasan yang ada. Penerapan pendataan berbasis NIK di pangkalan dinilai belum berjalan secara terbuka dan optimal.

Hasil wawancara Ibu Khadijah menyebutkan bahwa:

“Pendataan menggunakan KTP tidak transparan dan pada saat pembelian tidak efektif karena membuat antrean semakin panjang”.

Permasalahan utama yang masih dirasakan adalah keterbatasan stok serta lemahnya pengawasan terhadap pendataan dan distribusi.

2) Faktor Lingkungan dan Ekonomi

Keterlambatan penyaluran yang pada beberapa kesempatan hanya berlangsung sekali dalam sebulan menyebabkan terjadinya antrean panjang serta kelangkaan pasokan. Kondisi tersebut akhirnya membuat masyarakat terpaksa membeli dari pengecer dengan harga yang lebih mahal.

Hasil wawancara Ibu Khadijah menyebutkan bahwa:

“Pembelian Gas LPG 3 Kg dipangkalan cukup mudah dan jarang terjadi kekosongan tetapi ada beberapa waktu dimana

kedatangannya terlambat, bahkan hanya 1 kali dalam sebulan, walaupun begitu sering terjadinya antrean yang lumayan panjang saat pembelian Gas LPG 3 Kg ditambah lagi dengan adanya pembelian borongan dari pengecer”.

Informan mengungkapkan bahwa proses pembelian di pangkalan seringkali diwarnai antrean yang cukup panjang, meskipun tidak selalu terjadi kekosongan stok. Namun, dalam beberapa kondisi, keterlambatan distribusi yang biasanya hanya datang satu kali dalam sebulan menyebabkan gas sempat tidak tersedia. Perbedaan harga juga menjadi faktor penting, di mana harga di pangkalan relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di tingkat pengecer. Namun kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat tetap membeli di pengecer ketika pasokan di pangkalan terbatas.

3) Faktor Pengawasan dan Komunikasi

Hasil wawancara Ibu Khadijah menyebutkan bahwa:

“Aparat desa pernah mengadakan sosialisasi terkait penggunaan Gas LPG 3 Kg tapi ujung-ujungnya menawarkan alat masak kepada warga yang hadir saat itu”.

Meskipun pihak desa dan RT telah melakukan sosialisasi, upaya tersebut dianggap belum maksimal karena belum mampu mencegah terjadinya penyimpangan, seperti penjualan kembali gas oleh pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran penyaluran LPG 3 kg di Desa Tambak Anyar Ilir.

b. Informan 2 Hikmah, Desa Tambak Anyar Ilir, Rt.1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hikmah, seorang ibu rumah tangga yang menjadi penerima aktif LPG 3 kg di RT 1 Desa Tambak Anyar Ilir, Hasil wawancara menunjukkan adanya pandangan yang cenderung positif dari responden terhadap ketepatan sasaran penyaluran gas LPG 3 kg di Desa Tambak Anyar Ilir.

Hasil wawancara Ibu Hikmah menyebutkan bahwa:

“Gas LPG 3 Kg diperuntukkan untuk Masyarakat yang kurang mampu dan untuk pelaku usaha kecil”.

Dalam pemahamannya, gas LPG 3 kg memang diperuntukkan bagi kelompok tersebut, sementara usaha besar tidak termasuk dalam kategori penerima. Meskipun demikian, responden juga mengakui bahwa di lapangan masih ditemukan warga dengan kondisi ekonomi lebih baik yang turut membeli Gas LPG Kg, sehingga menunjukkan bahwa penerapan aturan belum sepenuhnya konsisten.

Hasil wawancara Ibu Hikmah menyebutkan bahwa:

“Program Gas LPG 3 Kg sudah tepat sasaran, karena semua masyarakat sekitar rumah saya mendapatkan Gas LPG Kg termasuk Masyarakat yang tergolong mampu juga mendapatkannya, pendataan yang dilakukan pangkalan kemasyarakat juga sangat baik karena dilakukan mendatangi dari rumah ke rumah”.

Responden menilai bahwa program ini pada dasarnya telah berjalan cukup adil, terutama karena proses pendataan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah sehingga dianggap mampu menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan, seperti keluarga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.

Menurut persepsi Ibu Hikmah, Ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran tersebut:

1) Faktor Teknis dan Operasional

Hasil wawancara Ibu Hikmah menyebutkan bahwa:

“Pembelian Gas LPG 3 Kg dipangkalan biasanya hanya membawa kartu pengambilan bukan KTP, untuk mendapatkan kartu tersebut Masyarakat disuruh untuk menebus kartunya di pangkalan dengan membayar sebesar Rp.8.000, dan untuk sosialisasi dari aparat desa ada saja”.

Dalam hal transparansi, sistem pendataan dianggap cukup terbuka karena dilakukan melalui pendataan langsung dan penebusan kartu pengambilan gas LPG 3 kg, meskipun sering terdapat kendala kecil seperti kehilangan kartu namun masih bisa diatasi.

Hasil wawancara Ibu Hikmah menyebutkan bahwa:

“Untuk mendapatkan Gas LPG 3 Kg dipangkalan tempat saya membeli, mudah saja karena saya membeli Gas hanya setiap setengah bulan sekali, jadi tidak pernah merasakan kehabisan stok pada saat pembelian walaupun pangkalan kadang lebih mengutamakan pembelian borongan dari pengecer”.

Dari pengalaman dalam memperoleh gas, responden mengungkapkan bahwa proses pembelian di pangkalan relatif mudah dan ketersediaan stok umumnya cukup karena responden hanya membeli setiap 15 hari sekali.

2) Faktor Lingkungan dan Ekonomi

Hasil wawancara Ibu Hikmah menyebutkan bahwa:

“pangkalan kadang lebih mengutamakan pembelian borongan dari pengecer”.

Dalam beberapa situasi terdapat kecenderungan pelayanan yang lebih mengutamakan pembeli dalam jumlah besar, seperti pengecer. Harga di pangkalan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan pengecer, dengan selisih yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat, sehingga pembelian di pangkalan tetap menjadi pilihan utama.

3) Faktor Pengawasan dan Komunikasi

Hasil wawancara Ibu Hikmah menyebutkan bahwa:

“Untuk sosialisasi dari aparat desa dulu ada saja”.

Sosialisasi dari pemerintah desa juga pernah dilakukan, namun belum berlangsung secara berkelanjutan.

Hasil wawancara Ibu Hikmah menyebutkan bahwa:

“Ketersediaan gas dipangkalan kadang kosong karena keterlambatan kedatangan dari sananya, dan tidak ada pengawasan dari pihak aparat desa terkait penyaluran Gas LPG Kg di pangkalan”.

Adapun kendala utama yang dirasakan bukan terletak pada mekanisme distribusi di tingkat desa, melainkan pada keterlambatan pasokan dari pihak distributor yang terkadang menghambat ketersediaan gas. Selain itu, pengawasan dari pihak pangkalan maupun pemerintah desa dinilai belum maksimal,

khususnya dalam mencegah praktik penjualan kembali oleh pengecer dengan harga lebih tinggi. Dengan demikian, meskipun secara umum program ini dipersepsikan telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa celah dalam pelaksanaan di lapangan yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap keadilan dan ketepatan sasaran penyaluran gas LPG 3 kg.

c. Informan 3 Hamsani, Desa Tambak Anyar Ilir, Rt.1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamsani, seorang petani yang menjadi penerima aktif LPG 3 kg di RT 1 Desa Tambak Anyar Ilir, terlihat adanya pembahasan yang cukup mendalam antara peneliti dan responden mengenai persepsi masyarakat terhadap penyaluran gas LPG 3 kg di Desa Tambak Anyar Ilir. Responden yang merupakan penerima aktif menjelaskan bahwa ia memahami program tersebut sebagai kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam praktiknya, pembelian gas dilakukan dengan menggunakan identitas seperti KTP atau NIK. Dari penjelasan ini, dapat diketahui bahwa responden memiliki pemahaman dasar mengenai tujuan dan mekanisme program yang dijalankan.

Hasil wawancara Bapak Hamsani menyebutkan bahwa:

“Saya mengetahui bahwa Gas LPG 3 Kg hanya untuk Masyarakat kurang mampu dan penggunaan NIK untuk membedakan warga yang berhak menerima dan yang tidak berhak menerima Gas LPG 3 Kg, tetapi hal tersebut tidak dapat menghambat orang yang mampu atau pengecer yang ikut membeli dipangkalan”.

Dari sisi pemahaman program, responden menyadari bahwa LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, dengan sistem pendataan berbasis NIK yang digunakan untuk membedakan antara warga yang berhak dan yang tidak. Kewajiban penggunaan identitas tersebut dinilai sebagai upaya untuk memastikan subsidi tepat sasaran sesuai kondisi ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, dalam pengamatan sehari-hari, responden masih menemukan adanya warga yang tergolong mampu tetap membeli gas bersubsidi, bahkan dalam jumlah banyak, sehingga memunculkan potensi ketidaktepatan dalam distribusi.

Terkait penilaian terhadap ketepatan sasaran, responden beranggapan bahwa secara umum sistem yang berjalan sudah cukup baik, terutama karena adanya mekanisme pendataan yang dianggap jelas serta pelayanan pangkalan yang dinilai memuaskan. Namun, di sisi lain masih terdapat praktik pembelian dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pihak tertentu, yang berpotensi mengganggu pemerataan distribusi bagi masyarakat lain.

Menurut persepsi Bapak Hamsani Ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran tersebut:

1) Faktor Teknis dan Operasional

Hasil wawancara Bapak Hamsani menyebutkan bahwa:

“ketersediaan gas dipangkalan tempat saya membeli kadang stoknya terbatas pada saat banyak yang ingin membeli, ada

beberapa kejadian dimana pangkalan lebih mementingkan menjual kepada pengecer yang membeli borongan dengan harga lebih tinggi, sehingga pangkalan memberitahukan kehabisan stok Gas LPG 3 Kg kepada Masyarakat yang ingin membeli”.

Dalam hal kendala, responden mengungkapkan bahwa ketersediaan gas terkadang terbatas saat permintaan meningkat, meskipun biasanya informasi kekosongan disampaikan kepada warga dan dapat diatasi dengan pembelian di waktu berikutnya.

2) Faktor Lingkungan dan Ekonomi

Hasil wawancara Bapak Hamsani menyebutkan bahwa:

“Perbandingan harga di pangkalan dan pengecer cukup tinggi sekitar Rp.15.000 – Rp. 20.000 pertabung pada saat kondisi mendesak seperti kelangkaan pada pangkalan dapat membuat harga bisa lebih mahal dipengecer”.

Dari segi harga, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pangkalan dan pengecer. Harga di pangkalan relatif lebih murah, sedangkan di tingkat pengecer bisa lebih tinggi, terutama saat kondisi mendesak. Perbedaan ini mendorong munculnya praktik penjualan kembali oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan.

3) Faktor Pengawasan dan Komunikasi

Hasil wawancara Bapak Hamsani menyebutkan bahwa:

“Sosialisasi dari aparat desa pernah dilakukan tetapi hanya terkait cara penggunaan Gas LPG 3 Kg dan tidak ada pengawasan dari aparat desa terkait penyaluran Gas LPG 3 Kg”.

Responden juga menyampaikan bahwa sosialisasi dari pemerintah desa pernah dilakukan, terutama terkait penggunaan

gas yang aman, namun pengawasan terhadap distribusi masih perlu diperkuat.

d. Informan 4 Isah, Desa Tambak Anyar Ilir, Rt.2

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Harisah, seorang ibu rumah tangga yang menjadi penerima aktif LPG 3 kg di RT 2 Desa Tambak Anyar Ilir.

Hasil wawancara Ibu Isah menyebutkan bahwa:

“Saya paham dasarnya kalau program subsidi LPG 3 kg ini dari pemerintah buat bantu masyarakat berpenghasilan rendah. Pas beli, wajib tunjukkan KTP buat verifikasi identitas yang nyambung sama data NIK. Kebijakan ini biar penyalurannya lebih terarah ke yang beneran butuh. Tapi saya belum ngerti banget tujuan teknisnya secara detail, yang saya tahu cuma LPG 3 kg buat orang yang kurang mampu”.

Dapat diketahui bahwa responden memiliki pemahaman dasar mengenai program subsidi LPG 3 kg sebagai kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Responden menjelaskan bahwa dalam proses pembelian, masyarakat diwajibkan menunjukkan KTP sebagai bentuk verifikasi identitas yang dikaitkan dengan data NIK. Menurutnya, kebijakan ini dimaksudkan agar penyaluran gas bersubsidi dapat lebih terarah kepada kelompok yang memang membutuhkan. Namun demikian, responden mengakui bahwa ia belum sepenuhnya memahami secara rinci tujuan teknis dari penggunaan KTP tersebut, dan hanya mengetahui bahwa gas LPG 3 kg diperuntukkan bagi orang yang kurang mampu.

Hasil wawancara Ibu Isah menyebutkan bahwa:

“Saya rasa penyalurannya sudah tepat sasaran tetapi masih banyak dari masyarakat yang mampu juga ikut membeli Gas LPG 3 Kg tersebut”.

Dalam praktik di lapangan, responden menilai bahwa program ini secara umum sudah berjalan cukup baik dan cenderung tepat sasaran. Hal ini terlihat dari terpenuhinya kebutuhan gas bagi masyarakat kecil di desa. Meskipun demikian, masih ditemukan adanya ketidaksesuaian, di mana sebagian warga yang secara ekonomi tergolong mampu tetap membeli gas LPG 3 kg. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah dirancang untuk menyaring penerima, masih terdapat celah dalam pelaksanaannya yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.

Menurut persepsi Ibu Harisah ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran tersebut:

1) Faktor Tekni dan Operasional

Hasil wawancara Ibu Isah menyebutkan bahwa:

“pendataan NIK yang dilakukan oleh pangkalan pada saat pembelian Gas KPG 3 Kg masih kurang transparan”.

Walaupun sistem pendataan berbasis NIK juga dinilai berjalan dengan kurang transparan tetapi tidak menimbulkan kendala berarti dalam proses pembelian. Tetapi hal tersebut membuat praktik pembelian oleh masyarakat mampu serta adanya penjualan kembali ke pengecer dari sisa stok yang tersedia.

Hasil wawancara Ibu Isah menyebutkan bahwa:

“Ketersediaan gas dipangkalan bisa dibilang mencukupi saja tetapi harus cepat-cepatan datang kepangkalan karena kalau terlambat akan kehabisan stok dan penyaluran dari Pertamina kepangkalan hanya setengah bulan sekali jadi jika tidak kebagian maka membeli dipengecer meski dengan harga yang lebih mahal”.

Dilihat dari pengalaman pembelian, responden menyampaikan bahwa ketersediaan gas di pangkalan relatif mencukupi, selama masyarakat datang sesuai waktu yang ditentukan. Namun, jika datang terlambat, stok bisa saja habis karena sistem antrian berdasarkan urutan kedatangan. Pengiriman gas biasanya dilakukan sekitar setengah bulan sekali, sehingga dalam kondisi tertentu masyarakat harus menunggu jadwal distribusi berikutnya.

2) Faktor Lingkungan dan Ekonomi

Hasil wawancara Ibu Isah menyebutkan bahwa:

“jika tidak kebagian maka membeli dipengecer meski dengan harga yang lebih mahal”.

Responden juga pernah membeli gas di pengecer ketika stok di pangkalan habis, meskipun harus membayar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga resmi di pangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kebutuhan mendesak sering kali mendorong masyarakat untuk mencari alternatif meskipun tidak sesuai dengan jalur distribusi resmi.

e. Informan 5 Uswatun Hasan, Desa Tambak Anyar Ilir, Rt.2

Informan Uswatun Hasanah, seorang ibu rumah tangga yang menjadi penerima aktif Gas LPG 3 kg, menunjukkan pemahaman yang cukup baik mengenai program tersebut.

Hasil wawancara Ibu Hasanah menyebutkan bahwa:

“Gas LPG 3 Kg hanya untuk Masyarakat miskin dan usah mikro, penebusan Gas LPG 3 Kg menggunakan KTP agar tepat sasaran untuk Masyarakat miskin, yang berhak menggunakan hanya Masyarakat miskin dan Masyarakat kaya tidak boleh menggunakan Gas LPG 3 Kg”.

Ia menjelaskan bahwa LPG 3 kg ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, dengan ketentuan pengambilan menggunakan KTP atau NIK sebagai upaya untuk memastikan penyaluran tepat sasaran. Menurutnya, yang berhak menerima adalah rumah tangga kurang mampu, sedangkan masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih baik seharusnya tidak ikut menggunakan gas bersubsidi. Pemahaman ini sejalan dengan tujuan kebijakan pemerintah yang mengarahkan subsidi kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Hasil wawancara Ibu Hasanah menyebutkan bahwa:

“Saya sering lihat sendiri di pangkalan gas di sini, masih ada yang kelihatan mampu beli gas 3 kg. Padahal seharusnya buat yang tidak mampu, tapi masih campur aduk gitu. Distribusinya belum pas sasaran. Tapi buat saya pribadi, gampang aja belinya di pangkalan, nggak pernah susah. Cuma kalau lagi habis stok, terpaksa ke pengecer. KTP buat verifikasi lumayan membantu, biar nggak sembarangan. Harganya di pangkalan juga jauh lebih murah daripada di pengecer. Cuman, masih nggak adil distribusinya, soalnya ada warga miskin yang sampai tidak kebagian. Apalagi pengecer suka beli banyak-banyak, ambil untung besar”.

Berdasarkan pengalaman di lapangan, informan mengungkapkan bahwa masih terdapat penyimpangan dalam distribusi LPG 3 kg di Desa Tambak Anyar Ilir. Ia sering melihat masyarakat yang tergolong mampu tetap membeli gas di pangkalan, yang menunjukkan bahwa penyaluran belum sepenuhnya tepat sasaran. Meski demikian, dari sisi pribadi, ia tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh gas di pangkalan dan hanya membeli di pengecer ketika stok habis. Ia juga menilai bahwa penggunaan KTP cukup membantu dalam proses verifikasi, serta harga di pangkalan jauh lebih terjangkau dibandingkan di pengecer. Akan tetapi, ia tetap beranggapan bahwa distribusi belum adil karena masih ada masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bagian, terutama akibat adanya praktik pembelian dalam jumlah besar oleh pengecer.

Menurut persepsi Ibu Hasanah ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran tersebut:

1) Faktor Teknis dan Operasional

Hasil wawancara Ibu Hasanah menyebutkan bahwa:

“Sistem pendataan pake NIK di pangkalan ini udah lumayan bagus, transparan dan pelayanannya baik. Jarang stok kosong, cuma sesekali aja, jadi secara keseluruhan masih berjalan lancar”.

Dilihat dari aspek teknis dan operasional, informan menilai bahwa sistem pendataan berbasis NIK di pangkalan sudah berjalan dengan cukup baik dan transparan, serta didukung oleh

pelayanan yang memadai. Kendala seperti kekosongan stok hanya terjadi sesekali, sehingga secara umum sistem di pangkalan masih dapat berfungsi dengan baik.

2) Faktor Ekonomi dan lingkungan

Hasil wawancara Ibu Hasanah menyebutkan bahwa:

“Orang-orang suka beli banyak-banyak karena dorongan ekonomi, dan pengecer pada jual lagi ke mana-mana, itulah yang bikin penyimpangan. Saya tahu fenomena gitu ada, tapi saya nggak tahu detail harganya di pengecer beda berapa sama pangkalan, apalagi cara ngawasannya gimana”.

Di sisi lain, faktor ekonomi dan kondisi lingkungan turut memengaruhi ketepatan sasaran, di mana dorongan untuk membeli dalam jumlah banyak serta adanya praktik penjualan kembali oleh pengecer menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan distribusi. Informan juga menyadari adanya fenomena tersebut, meskipun tidak mengetahui secara rinci perbedaan harga di tingkat pengecer maupun mekanisme pengawasannya.

3) Faktor Pengawasan dan Kominokasi

Hasil wawancara Ibu Hasanah menyebutkan bahwa:

“Sosialisasi dari pemerintah desa pernah ada, tapi cuma umum aja, belum mendalam soal ngendaliin distribusi gasnya. Saya nggak tahu pasti aparat desa sudah melakukan apa aja buat cegah pengecer beli banyak lalu dijual lagi. Hambatan utama apa yang bikin nggak tepat sasaran juga saya belum bisa bilang lebih jelas”.

Terkait pengawasan dan komunikasi, informan menyampaikan bahwa sosialisasi dari pemerintah desa memang

pernah dilakukan, namun lebih bersifat umum dan belum menyentuh aspek pengendalian distribusi secara maksimal. Ia juga tidak mengetahui secara pasti peran aparat desa dalam mencegah penjualan kembali ke pengecer, serta belum dapat mengidentifikasi secara jelas hambatan utama yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran.

f. Informan 6 Ibrahim, Desa Tambak Anyar Ilir, Rt.2

Ibrahim, seorang pensiunan yang tinggal di RT 2 Desa

Tambak Anyar Ilir dan terdaftar sebagai penerima aktif LPG 3 kg,

Hasil wawancara Bapak Ibrahim menyebutkan bahwa:

“Awalnya saya nggak tahu ada program gas LPG 3 kg ini, sampai dikasih penjelasan sama peneliti. Baru ngerti kalau ini bantuan pemerintah buat yang penghasilannya rendah, belinya pake KTP atau NIK buat didata. Tapi saya masih agak bingung batasannya siapa aja yang boleh dan nggak boleh pake gas subsidi ini. Yang pasti, kan buat yang kurang mampu ya”.

Ia mengungkapkan bahwa pada awalnya ia belum mengetahui adanya program tersebut sebelum memperoleh penjelasan dari peneliti. Setelah diberikan pemahaman, ia menyadari bahwa LPG 3 kg merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan syarat pembelian menggunakan KTP atau NIK untuk keperluan pendataan penerima. Meski demikian, ia belum sepenuhnya memahami batasan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak dan tidak berhak menggunakan gas bersubsidi, walaupun ia mengetahui bahwa sasaran utamanya adalah masyarakat kurang mampu.

Hasil wawancara Bapak Ibrahim menyebutkan bahwa:

“Masih banyak warga yang keliatan mampu beli LPG 3 kg di pangkalan, jadi penyalurannya belum pas sasaran sepenuhnya. Saya sering ngantre panjang dan rebutan gas karena stoknya terbatas. Makanya, kalau habis di pangkalan, ya terpaksa beli di pengecer. Tapi pake KTP buat beli ini bagus, bantu awasi penerimanya. Harganya di pangkalan juga lebih murah daripada di warung. Buat saya pribadi, distribusinya sudah adil, soalnya saya terdaftar, meskipun saya tahu ada penyimpangan buat orang lain”.

Dalam praktik di lapangan, informan menyampaikan bahwa masih banyak warga yang tergolong mampu tetap membeli LPG 3 kg, sehingga penyalurannya belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia juga sering mengalami kondisi antrean dan saling berebut saat membeli di pangkalan karena ketersediaan gas yang terbatas. Akibatnya, ia pernah membeli di pengecer ketika stok di pangkalan habis. Secara pribadi, ia menilai penggunaan KTP sebagai syarat pembelian cukup baik karena membantu proses pendataan dan pengawasan penerima. Selain itu, harga di pangkalan dianggap lebih terjangkau dibandingkan di warung atau pengecer. Ia juga merasa distribusi sudah cukup adil bagi dirinya karena telah terdaftar sebagai penerima, meskipun ia mengakui masih terdapat penyimpangan yang dialami oleh masyarakat lain.

Menurut persepsi Bapak Ibrahim ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran tersebut:

1) Faktor Tekni dan Operasional

Hasil wawancara Bapak Ibrahim menyebutkan bahwa:

"Sistem pendataan pakai NIK di pangkalan ini sudah berjalan bagus, terbuka dan pelayanannya memadai. Tapi masalahnya stok sering kurang".

Dari sisi teknis dan operasional, informan menilai bahwa sistem pendataan berbasis NIK di pangkalan telah berjalan dengan cukup baik dan terbuka, serta didukung oleh pelayanan yang memadai. Namun, kendala utama yang sering terjadi adalah keterbatasan stok, yang berdampak pada sulitnya akses bagi masyarakat.

2) Faktor Lingkungan dan Ekonomi

Hasil wawancara Bapak Ibrahim menyebutkan bahwa:

"Faktor uang juga ngaruh, apalagi distribusi suka telat dan pengecer beli banyak-banyak, jadinya gas subsidi malah ke orang yang nggak berhak. Saya sendiri nggak tahu pasti beda harganya di pangkalan sama pengecer."

Dari perspektif kondisi ekonomi dan lingkungan, ia menilai bahwa faktor ekonomi sangat memengaruhi ketepatan sasaran, ditambah dengan seringnya keterlambatan distribusi gas dan adanya praktik pembelian dalam jumlah besar oleh pengecer, yang menyebabkan gas bersubsidi justru dinikmati oleh pihak yang tidak berhak. Ia sendiri tidak mengetahui secara pasti seberapa besar pengaruh perbedaan harga antara pangkalan dan pengecer terhadap perilaku pembelian masyarakat.

3) Faktor pengawasan dan Komunikasi

Hasil wawancara Bapak Ibrahim menyebutkan bahwa:

“Nggak ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah desa atau pihak lain soal penggunaan LPG 3 kg ini. Saya juga nggak lihat pengawasan ketat dari pengelola pangkalan atau aparat desa untuk cegah gas dijual lagi ke pengecer dengan harga lebih mahal. Penyebab kelangkaan atau kenapa distribusinya nggak tepat sasaran, saya juga nggak tahu pasti”.

Terkait aspek pengawasan dan komunikasi, informan menyatakan bahwa tidak terdapat sosialisasi yang jelas dari pemerintah desa maupun pihak terkait mengenai penggunaan LPG 3 kg. Selain itu, ia juga tidak melihat adanya pengawasan yang ketat dari pengelola pangkalan maupun aparat desa dalam mencegah penjualan kembali gas ke pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Ia pun tidak mengetahui secara pasti penyebab utama terjadinya kelangkaan maupun ketidaktepatan sasaran distribusi.

g. Informan 7 Rusdah Desa Tambak Anyar Ilir, Rt.3

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rusdah, seorang ibu rumah tangga yang menjadi penerima aktif LPG 3 kg di RT 3 Desa Tambak Anyar Ilir,

Hasil wawancara Ibu Rusdah menyebutkan bahwa:

“Saya sudah paham tujuan program subsidi LPG 3 kg ini buat masyarakat berpenghasilan rendah. Pembeliannya harus pake identitas kayak KTP atau Kartu Keluarga. Aturannya nggak terlalu susah, tapi praktiknya bikin lambat karena antrean panjang, apalagi di tiap pangkalan belum sama pelaksanaannya. Menurut saya, penyalurannya di desa ini masih belum tepat sasaran sepenuhnya, soalnya saya sering lihat orang yang ekonominya mampu tetap beli dan pake gas subsidi”.

Diperoleh gambaran bahwa ia telah memahami tujuan program subsidi tersebut, yakni diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga mengetahui bahwa pembelian gas harus menggunakan

identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga. Menurutnya, penerapan aturan tersebut tidak terlalu menyulitkan, namun dalam praktiknya dapat memperlambat proses karena menimbulkan antrean, terlebih lagi pelaksanaannya di setiap pangkalan belum sepenuhnya seragam. Dari sudut pandangnya, penyaluran LPG 3 kg di desa masih belum sepenuhnya tepat sasaran, karena ia kerap melihat masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu tetap membeli dan menggunakan gas bersubsidi.

Hasil wawancara Ibu Rusdah menyebutkan bahwa:

"Gas di pangkalan sering terbatas, bahkan habis total pas lagi langka. Harga di sini sekitar Rp23.000, lumayan lebih mahal daripada pangkalan lain. Kalau stok nggak ada atau nggak tahu kapan datangnya, terpaksa beli di pengecer dengan harga jauh lebih tinggi, apalagi pas kondisi susah. Pengecer suka beli banyak-banyak, gas yang seharusnya buat warga malah dialihkan ke mereka. Bahkan ada kasus pangkalan bilang habis ke warga, tapi tetep jual ke pengecer dengan harga lebih tinggi."

Berdasarkan pengalaman yang ia alami, ketersediaan gas di pangkalan sering kali terbatas, bahkan kerap habis terutama saat terjadi kelangkaan. Harga yang ia temui di pangkalan sekitar Rp23.000 dinilai relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa pangkalan lain. Ketika stok tidak tersedia atau informasi kedatangan gas tidak diketahui, ia terpaksa membeli dari pengecer dengan harga yang jauh lebih mahal, khususnya pada saat kondisi langka. Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya praktik pembelian dalam jumlah besar oleh pengecer, di mana gas yang seharusnya untuk masyarakat justru dialihkan, bahkan dalam beberapa kasus pangkalan menyatakan stok habis kepada warga namun tetap

menjual kepada pengecer dengan harga lebih tinggi.

Menurut persepsi Ibu Rusdah ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran tersebut:

1) Faktor Tekni dan Operasional

Hasil wawancara Ibu Rusdah menyebutkan bahwa:

“Sebagian pangkalan sudah lumayan terbuka soal pendataan pake NIK, pelayanannya juga bagus. Tapi masalah besarnya stok sering kosong”.

Dari sisi teknis dan pengawasan, Ibu Rusdah menilai bahwa sebagian pangkalan sudah cukup terbuka dalam hal pendataan berbasis NIK, serta pelayanan yang diberikan tergolong baik. Namun demikian, persoalan utama tetap terletak pada ketersediaan stok yang sering kosong. Ia juga menyampaikan bahwa sosialisasi terkait penggunaan LPG 3 kg dari pihak desa atau instansi terkait cukup sering dilakukan.

2) Faktor Pengawasan dan Komunikasi

Hasil wawancara Ibu Rusdah menyebutkan bahwa:

“Sosialisasi dari desa atau instansi soal LPG 3 kg ini sering dilakukan. Cuma peran aparat desa ngawasin distribusi, terutama cegah jual lagi ke pengecer, masih minim banget. Menurut saya, yang bikin nggak tepat sasaran utamanya harga gas di pangkalan murah jadi orang mampu ikut beli, ditambah pengawasan lemah, akhirnya langka dan distribusinya nggak adil”.

Meskipun begitu, peran aparat desa dalam mengawasi distribusi, khususnya untuk mencegah praktik penjualan kembali kepada pengecer, dinilai masih sangat minim. Menurutny,

faktor utama yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran adalah harga gas yang relatif murah di pangkalan sehingga menarik minat masyarakat mampu untuk ikut membeli, ditambah dengan lemahnya pengawasan, yang pada akhirnya memicu terjadinya kelangkaan dan distribusi yang kurang adil

h. Informan 8 Nur Ainah, Desa Tambak Anyar Ilir, Rt.3

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Ainah, seorang ibu rumah tangga di RT 3 yang pernah menjadi penerima LPG 3 kg bersubsidi,

Hasil wawancara Ibu Ainah menyebutkan bahwa:

“Saya pemahamannya masih terbatas soal program LPG 3 kg ini. Belum tahu rinci ketentuan atau prosedur beli di pangkalan, termasuk kenapa pemerintah wajibin pake KTP atau NIK. Tapi saya ngerti kok kalau ini buat masyarakat kurang mampu, dan orang menengah ke atas seharusnya nggak boleh pake. Praktiknya saya malah rugi, soalnya harus saingan sama warga yang punya usaha besar beli di pangkalan, jadinya kebutuhan saya sebagai yang berhak nggak terpenuhi sepenuhnya”.

Terlihat bahwa tingkat pemahaman terhadap program ini masih tergolong terbatas. Ia mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai ketentuan maupun prosedur pembelian di pangkalan, termasuk alasan pemerintah mewajibkan penggunaan KTP atau NIK. Meski demikian, ia tetap memahami bahwa LPG 3 kg ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan menyadari bahwa kelompok ekonomi menengah ke atas seharusnya tidak menggunakannya. Namun dalam praktikanya, ia merasa kurang diuntungkan karena harus bersaing dengan warga yang memiliki usaha besar dan tetap membeli gas di

pangkalan, sehingga kebutuhannya sebagai pihak yang berhak tidak sepenuhnya terpenuhi.

Hasil wawancara Ibu Ainah menyebutkan bahwa:

“Saya sering lihat masyarakat yang keliatan mampu masih beli LPG 3 kg di desa ini. Akses di pangkalan susah banget, warga pada rebutan gas, jadi saya lebih pilih beli di pengecer aja. Di sana lebih gampang dan praktis, nggak perlu antre panjang atau ribet prosedur, meskipun harganya jauh lebih mahal daripada pangkalan. Makanya saya rasa distribusi di pangkalan belum benar-bener ngebantu yang butuh”.

Dari pengalaman sehari-hari, Ibu Nur Ainah sering menyaksikan bahwa masyarakat yang tergolong mampu masih membeli LPG 3 kg di desa. Ia menilai akses di pangkalan cukup sulit karena warga cenderung saling berebut untuk mendapatkan gas, sehingga ia lebih memilih membeli di pengecer. Menurutnya, pembelian di pengecer terasa lebih mudah dan praktis karena tidak perlu antre panjang atau mengikuti prosedur tertentu, walaupun harga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dibandingkan di pangkalan. Kondisi ini membentuk pandangannya bahwa distribusi LPG 3 kg di pangkalan belum sepenuhnya memihak masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menurut persepsi Ibu Ainah ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran tersebut:

1) Faktor Tekni dan Operasional

Hasil wawancara Ibu Ainah menyebutkan bahwa:

“Aturan pake KTP sebenarnya bisa bantu batasin orang mampu beli gas. Tapi di Desa Tambak Anyar Ilir ini,

penyalurannya masih nggak adil dan belum tepat sasaran, soalnya banyak yang nggak berhak ikut nikmatin subsidi”.

Dalam penilaiannya, aturan penggunaan KTP sebenarnya dapat membantu membatasi pembelian oleh masyarakat mampu. Namun demikian, ia tetap berpendapat bahwa penyaluran LPG 3 kg di Desa Tambak Anyar Ilir masih belum adil dan belum tepat sasaran, karena masih banyak pihak yang tidak berhak ikut menikmati subsidi tersebut.

2) Faktor Lingkungan dan Ekonomi

Hasil wawancara Ibu Ainah menyebutkan bahwa:

“Saya tahu pengecer beli banyak, bahkan ada yang pake KTP orang lain buat beli gas untuk kepentingan usaha”.

Ia juga mengetahui adanya praktik pembelian dalam jumlah besar oleh pengecer serta penggunaan identitas orang lain untuk membeli gas bagi kepentingan usaha, yang semakin memperburuk ketidaktepatan distribusi.

3) Faktor Pengawasan dan Komunikasi

Hasil wawancara Ibu Ainah menyebutkan bahwa:

“Nggak pernah ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah desa soal LPG 3 kg, peran aparat desa ngawasin juga minim, apalagi cegah jual lagi dengan harga tinggi. Masalah pokoknya marak beli besar-besaran di pangkalan, jadinya kami yang berhak malah susah dapet gas sesuai kebutuhan”.

Selain itu, ia menyatakan bahwa tidak pernah ada sosialisasi yang jelas dari pemerintah desa terkait penggunaan LPG 3 kg, serta minimnya peran aparat desa dalam mengawasi penyaluran,

khususnya dalam mencegah penjualan kembali dengan harga tinggi. Menurutnya, permasalahan utama terletak pada maraknya pembelian dalam jumlah besar di pangkalan, yang menyebabkan masyarakat yang seharusnya berhak justru kesulitan memperoleh gas sesuai kebutuhan mereka.

i. Informan 9 Wahyudinnor, Desa Tambak Anyar Ilir, Rt.3

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudinnor, seorang wiraswasta di RT 3 yang pernah menjadi penerima LPG 3 kg.

Hasil wawancara Bapak Wahyu menyebutkan bahwa:

“Pemahaman saya soal program LPG 3 kg ini masih terbatas banget. Saya belum tahu rinci aturan atau prosedur beli di pangkalan, termasuk buat apa pake KTP atau NIK saat transaksi. Tapi saya ngerti kalau ini seharusnya buat masyarakat penghasilan rendah, bukan buat yang ekonominya lebih mampu. Kenyataannya, rumah tangga kayak saya sering kalah saing sama pelaku usaha besar yang beli di pangkalan, jadinya banyak yang berhak malah nggak kebagian”.

diketahui bahwa tingkat pemahamannya terhadap program tersebut masih terbatas. Ia mengaku belum mengetahui secara rinci aturan maupun prosedur pembelian di pangkalan, termasuk tujuan penggunaan KTP atau NIK dalam transaksi. Meskipun demikian, ia memahami bahwa LPG 3 kg seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bukan untuk kelompok yang secara ekonomi lebih mampu. Dalam kenyataannya, ia merasa rumah tangga seperti dirinya sering kalah bersaing dengan pelaku usaha besar yang juga membeli di pangkalan, sehingga banyak masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak mendapatkan bagian.

Hasil wawancara Bapak Wahyu menyebutkan bahwa:

“Saya sering lihat warga yang mampu tetep beli gas LPG 3 kg. Ketersediaannya di pangkalan susah banget, persaingan ketat apalagi yang ambil banyak. Makanya saya lebih sering beli di pengecer, lebih gampang nggak perlu antre, meskipun harganya lebih mahal sekitar Rp5.000 dari pangkalan. Bahkan kalau di pengecer naik tajam, saya pilih pake kayu bakar aja”.

Dari pengalaman yang dialaminya, Bapak Wahyudinnor kerap melihat warga yang tergolong mampu tetap membeli gas LPG 3 kg. Ia juga merasakan langsung bahwa ketersediaan gas di pangkalan cukup sulit karena adanya persaingan, terutama dari pembeli yang mengambil dalam jumlah banyak. Kondisi ini membuatnya lebih sering membeli di pengecer karena dianggap lebih mudah dan tidak perlu antre, meskipun harus membayar dengan harga yang lebih mahal, selisih sekitar Rp5.000 dari harga pangkalan. Bahkan, ketika harga di pengecer meningkat tajam, Bapak Wahyudinnor memilih beralih menggunakan kayu bakar sebagai alternatif.

Hasil wawancara Bapak Wahyu menyebutkan bahwa:

“Aturan pake KTP malah kurang fleksibel, batasin akses masyarakat. Harga di pangkalan juga nggak selalu sama, penyalurannya di desa masih belum tepat sasaran, banyak warga miskin nggak kebagian gas”.

Dalam pandangannya, aturan penggunaan KTP dalam pembelian justru dirasa kurang fleksibel karena dianggap membatasi akses masyarakat. Ia juga menilai bahwa harga di pangkalan tidak selalu seragam dan penyaluran Gas LPG 3 kg di desa masih belum tepat sasaran, karena masih banyak warga kurang mampu yang tidak

memperoleh gas secara layak.

Menurut persepsi Ibu Ainah ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran tersebut:

1) Faktor Tekni dan Operasional

Hasil wawancara Bapak Wahyu menyebutkan bahwa:

“Sistem pendataan NIK dan pelayanan di pangkalan belum optimal, stok sering terbatas”.

Dari sisi teknis, ia menilai sistem pendataan berbasis NIK serta pelayanan di pangkalan belum berjalan optimal. Selain itu, ketersediaan stok sering terbatas.

2) Faktor Lingkungan dan Ekonomi

Hasil wawancara Bapak Wahyu menyebutkan bahwa:

“sering liat pengecer beli banyak”.

Praktik pembelian dalam jumlah besar oleh pengecer masih terjadi.

3) Faktor Pengawasan dan Komunikasi

Hasil wawancara Bapak Wahyu menyebutkan bahwa:

“sosialisasi dan peran pemerintah desa nggak keliatan. Makanya perlu tambah pasokan di pangkalan biar harga stabil dan distribusi lebih merata”.

Tidak terlihat adanya sosialisasi maupun peran aktif pemerintah desa dalam mengendalikan penyaluran. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa perlu adanya penambahan pasokan di pangkalan agar harga lebih stabil dan distribusi dapat berlangsung

lebih merata.

- j. Informan Pemilik Pangkalan Ahmad Sarikani, Desa Tambak Anyar Ilir, Rt.2

Ahmad Sarkani, selaku pemilik pangkalan LPG 3 kg di Desa Tambak Anyar Ilir yang telah beroperasi selama kurang lebih empat tahun, mengungkapkan bahwa kuota kontrak yang seharusnya mencapai 300 tabung per bulan pada kenyataannya hanya terealisasi sekitar 200 tabung.

Hasil wawancara Bapak Sarkani menyebutkan bahwa:

“Kebijakan pemerintah wajib tunjukkan KTP atau NIK pas beli gas ini langkah yang tepat menurut saya. Dari pengalaman saya, kebanyakan pembeli dari warga sekitar pangkalan, rata-rata yang penghasilan rendah atau usaha kecil yang memang sasaran subsidi. Meskipun ada sih yang nggak seharusnya dapet subsidi tapi tetep beli. Secara umum, masyarakat nerima baik kebijakan pake KTP ini, nggak ada penolakan”.

Ia menilai kebijakan pemerintah yang mewajibkan pembeli menunjukkan KTP atau NIK saat melakukan pembelian merupakan langkah yang tepat. Berdasarkan pengalamannya, sebagian besar pembeli berasal dari warga sekitar pangkalan dan umumnya termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau pelaku usaha kecil yang memang menjadi sasaran subsidi. Meski demikian, ia juga mengakui bahwa masih terdapat pihak yang tidak seharusnya menerima Gas LPG 3 kg bersubsidi namun tetap melakukan pembelian. Secara umum, masyarakat menerima kebijakan penggunaan KTP tersebut dengan baik tanpa adanya penolakan yang berarti.

Menurut persepsi Ibu Ainah ditemukan sejumlah faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran tersebut:

1) Kendala Teknis

Hasil wawancara Bapak Sarkani menyebutkan bahwa:

“Kendala seringnya gangguan aplikasi pendataan pas transaksi. Kalau pasokan dari agen terbatas tapi pembeli rame, kami kasih prioritas yang dateng duluan”.

Dari sisi teknis, kendala yang sering dihadapi adalah gangguan pada aplikasi pendataan yang digunakan dalam proses transaksi. Selain itu, ketika pasokan gas dari agen terbatas sementara jumlah pembeli cukup banyak, distribusi biasanya diberikan kepada mereka yang datang lebih awal.

2) Faktor Harga dan Ekonomi

Hasil wawancara Bapak Sarkani menyebutkan bahwa:

“Harga di pangkalan selalu sesuai ketentuan pemerintah. Tapi pengecer jual lagi dengan harga jauh lebih tinggi itu memang ada. Pernah ada yang beli banyak buat dijual lagi. Kadang tetep kami layani karena butuh tabung kosong buat balikin ke Pertamina, dan permintaan pengecer. Harganya ke mereka biasanya lebih tinggi dari harga masyarakat biasa, tapi lebih karena mereka yang minta, bukan kami yang mulai. Ada juga pangkalan lain yang kasih harga beda khusus buat pengecer”.

Dalam hal harga, ia menegaskan bahwa pangkalan selalu menjual sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, ia menyoroti praktik pengecer yang menjual kembali gas dengan harga jauh lebih tinggi. Ia juga mengungkapkan bahwa pernah terjadi pembelian dalam jumlah besar oleh pihak tertentu

untuk dijual kembali. Kondisi ini terkadang tetap dilayani karena pangkalan membutuhkan tabung kosong untuk dikembalikan ke Pertamina, serta adanya permintaan dari pengecer. Harga yang diberikan kepada pengecer biasanya lebih tinggi dibandingkan harga untuk masyarakat umum, meskipun praktik ini lebih dipicu oleh permintaan dari pengecer, bukan inisiatif pangkalan. Bahkan, ia menyebutkan bahwa terdapat pangkalan lain yang secara khusus menetapkan harga berbeda bagi pengecer.

3) Pengawasan dan Koordinasi

Hasil wawancara Bapak Sarkani menyebutkan bahwa:

“Nggak ada pemantauan langsung dari pemerintah desa atau instansi soal penyaluran di pangkalan. Pas ada kelangkaan atau keluhan warga, nggak ada tindak lanjut atau arahan dari desa sama sekali”.

Dari aspek pengawasan dan koordinasi, ia menyatakan bahwa tidak ada pemantauan langsung dari pemerintah desa maupun instansi terkait terhadap kegiatan penyaluran di pangkalan. Ketika terjadi kelangkaan atau keluhan dari masyarakat, tidak ada tindak lanjut atau arahan yang diberikan oleh pihak desa.

4) Efektivitas Penyaluran

Hasil wawancara Bapak Sarkani menyebutkan bahwa:

“Menurut saya, kendala utama LPG 3 kg susah sampe ke yang beneran butuh itu keterlambatan distribusi dari Pertamina dan pengecer beli banyak yang ganggu pemerataan. Buat perbaikan ke depan, distribusi dari Pertamina harus tepat waktu sesuai jadwal yang udah ditentuin.”

Menurutnya, kendala utama yang menyebabkan Gas LPG 3

kg sulit menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan adalah keterlambatan distribusi dari Pertamina serta adanya pembelian dalam jumlah besar oleh pengecer yang mengganggu pemerataan. Untuk perbaikan ke depan, ia menyarankan agar distribusi dari Pertamina dapat dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem verifikasi menggunakan KTP telah berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Keterlambatan pasokan, kendala pada sistem aplikasi, praktik pembelian dalam jumlah besar oleh pengecer, serta lemahnya pengawasan dari pihak terkait menjadi faktor utama yang menyebabkan distribusi Gas LPG 3 kg belum sepenuhnya tepat sasaran. Kondisi ini sejalan dengan pandangan teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya kesiapan teknis, ketersediaan sumber daya, serta efektivitas pengawasan dalam mencapai tujuan program subsidi secara optimal.

k. Informan Aparat Desa Wardah Kaur Umum dan Perencanaan

Wardah, yang menjabat sebagai Kaur Umum dan Perencanaan di Desa Tambak Anyar Ilir selama kurang lebih delapan tahun,

Hasil wawancara Ibu Wardah menyebutkan bahwa:

“Saya paham penyaluran LPG 3 kg di desa ada prosedurnya, pembeli wajib tunjukin KTP dan tanda tangan dulu sebelum beli. Soal informasi aturan itu, aparat desa cuma sesekali share lewat grup WhatsApp, nggak ada sosialisasi langsung ke masyarakat. Lebih

banyak diserahkan ke pemilik pangkalan. Kegiatan PKK yang pernah ada lebih fokus cara pake gasnya, bukan aturan distribusinya. Menurut saya, yang harus diprioritaskan pelaku UMKM dan warga kurang mampu, ditentuin dari data warga yang ada di desa”.

memahami bahwa penyaluran Gas LPG 3 kg di desa dilakukan dengan prosedur tertentu, yakni pembeli diwajibkan menunjukkan KTP dan memberikan tanda tangan sebelum melakukan pembelian. Dalam hal penyampaian informasi terkait aturan tersebut, aparat desa hanya sesekali membagikannya melalui grup WhatsApp, tanpa adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat. Penyampaian informasi lebih banyak diserahkan kepada pemilik pangkalan, sementara kegiatan dari PKK yang pernah dilakukan cenderung berfokus pada cara penggunaan gas, bukan pada aturan distribusinya. Menurut pandangannya, penerima yang seharusnya diprioritaskan adalah pelaku UMKM dan masyarakat kurang mampu, yang penentuannya merujuk pada data warga yang dimiliki oleh desa.

Hasil wawancara Ibu Wardah menyebutkan bahwa:

“LPG 3 kg di desa ini cenderung dipake sama yang butuh, meskipun saya nggak bisa pastiin 100% udah tepat sasaran atau belum. Pas ada keluhan warga soal susah dapet gas atau harga mahal di pengecer, desa nggak ikut campur langsung, soalnya itu kewenangan agen atau pangkalan”.

Berdasarkan pengamatannya, Wardah menilai bahwa Gas LPG 3 kg di desa cenderung dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, meskipun ia tidak dapat memastikan secara pasti apakah penyalurannya sudah benar-benar tepat sasaran. Ketika muncul keluhan dari warga terkait kesulitan memperoleh gas atau

tingginya harga di tingkat pengecer, pihak desa tidak terlibat secara langsung karena urusan tersebut dianggap menjadi kewenangan agen atau pangkalan.

1) Faktor Teknis

Hasil wawancara Ibu Wardah menyebutkan bahwa:

“Dari sisi teknis, pake KTP pas beli udah lancar kok, tapi pemerintah desa nggak ikut verifikasi data pembeli di pangkalan sama data warga desa”.

Dari sisi teknis, ia menilai penggunaan KTP dalam proses pembelian berjalan cukup lancar, namun pemerintah desa tidak ikut berperan dalam mencocokkan data pembeli di pangkalan dengan data warga yang dimiliki desa.

2) Faktor Pengawasan

Hasil wawancara Ibu Wardah menyebutkan bahwa:

“Pengawasan koordinasi desa sama pemilik pangkalan terbatas banget, pengendalian stok dan harga sepenuhnya urusan pangkalan. Kalau ada laporan dugaan jual LPG subsidi ke pengecer besar, aparat desa cuma arahkan balik ke pangkalan, nggak ada tindak lanjut tegas”.

Dalam hal pengawasan, koordinasi antara pemerintah desa dan pemilik pangkalan dinilai sangat terbatas, karena pengendalian terkait stok maupun harga sepenuhnya diserahkan kepada pihak pangkalan. Jika terdapat laporan mengenai dugaan penjualan Gas LPG kg bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak, seperti pengecer besar, aparat desa hanya mengarahkan permasalahan tersebut kembali ke pangkalan tanpa adanya tindak lanjut yang

lebih tegas.

3) Faktor Lingkungan dan Kendala

Hasil wawancara Ibu Wardah menyebutkan bahwa:

“Saya sendiri rasa distribusi LPG 3 kg di desa udah cukup tepat sasaran, pengawasan dan teknis lainnya tanggung jawab pangkalan. Pengaruh harga tinggi di pengecer ke akses warga miskin saya nggak tahu pasti”.

Wardah sendiri beranggapan bahwa distribusi Gas LPG 3 kg di desa sudah cukup tepat sasaran, sementara aspek pengawasan dan pengelolaan teknis lainnya dianggap menjadi tanggung jawab pangkalan. Ia juga tidak mengetahui secara pasti sejauh mana pengaruh harga tinggi di tingkat pengecer terhadap akses masyarakat kurang mampu dalam memperoleh gas subsidi.

4) Efektivitas Program

Hasil wawancara Ibu Wardah menyebutkan bahwa:

“Secara umum, program ini udah bantu ringanin beban ekonomi masyarakat desa”.

Secara umum, ia menilai program Gas LPG 3 kg telah membantu meringankan beban ekonomi masyarakat di desa tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan distribusi Gas LPG 3 kg masih sangat terbatas. Pola komunikasi yang kurang intensif, tidak adanya sosialisasi langsung, minimnya verifikasi data pembeli, serta lemahnya pengawasan terhadap pangkalan menjadi indikator utama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun aturan telah

ditetapkan dengan jelas dan diterima oleh masyarakat, kurangnya peran aktif pemerintah desa menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat tercapainya distribusi subsidi yang benar-benar tepat sasaran.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Persepsi Masyarakat terhadap Ketepatan Sasaran Penyaluran Gas LPG 3 Kg

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tambak Anyar Ilir, ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap ketepatan sasaran penyaluran Gas LPG 3 kg bersubsidi menunjukkan adanya variasi penilaian, yang terbentuk dari pengalaman langsung masyarakat dalam mengakses Gas LPG 3 kg di lapangan. Persepsi ini sejalan dengan konsep teori persepsi dari Jalaludin Rakhmat yang digunakan dalam penelitian, yaitu bahwa persepsi merupakan hasil dari proses penilaian individu terhadap suatu objek berdasarkan pengalaman, pemahaman, peristiwa dan kondisi lingkungan sosial yang dialami. Masyarakat pada dasarnya sudah mengetahui bahwa Gas LPG 3 kg bersubsidi ditujukan bagi kelompok berpenghasilan rendah atau kurang mampu dan pelaku usaha kecil. Kebijakan penggunaan KTP/NIK juga dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menertibkan distribusi agar lebih tepat sasaran. Artinya secara informasi, pesan kebijakan telah diterima dan dipahami oleh masyarakat.

Sebagian masyarakat menilai bahwa penyaluran Gas LPG 3 kg masih belum tepat sasaran. Hal ini terlihat dari hasil penelitian dan

wawancara dengan para informan yang menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tergolong mampu ikut membeli Gas LPG 3 kg, bahkan dalam jumlah besar, serta juga adanya praktik pembelian oleh pengecer dari pangkalan. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan utama kebijakan subsidi, yaitu untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Temuan ini memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, mekanisme distribusi belum sepenuhnya mampu membatasi akses hanya kepada kelompok yang berhak. Selain itu, fenomena seperti antrian panjang, keterlambatan distribusi, serta keterbatasan stok juga turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap ketepatan sasaran Gas LPG 3 kg. Meskipun tidak selalu terjadi kelangkaan, namun distribusi yang tidak stabil menyebabkan masyarakat harus bersaing untuk mendapatkan gas, sehingga muncul kesan bahwa akses terhadap Gas LPG 3 kg belum sepenuhnya adil.

Namun disisi lain, terdapat pula masyarakat yang menilai bahwa penyaluran Gas LPG 3 kg sudah cukup tepat sasaran. Persepsi ini didasarkan pada pengalaman mereka yang relatif mudah dalam mendapatkan gas serta adanya sistem pendataan yang dilakukan langsung oleh pihak pangkalan kepada masyarakat. Pendataan dari rumah ke rumah dan penggunaan kartu pengambilan dianggap sebagai bentuk upaya untuk memastikan distribusi berjalan dengan lebih terarah.

Meskipun demikian, bahkan kelompok masyarakat yang memiliki persepsi positif tetap mengakui adanya kelemahan dalam pelaksanaan,

seperti masih adanya masyarakat mampu yang ikut membeli Gas LPG 3 kg serta kurangnya pengawasan terhadap distribusi ditingkat pangkalan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi positif yang muncul bukan berarti sistem telah berjalan sempurna, melainkan hanya dianggap cukup baik dibandingkan kondisi sebelumnya.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas, maka ketepatan sasaran penyaluran Gas LPG 3 kg dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif. Hal ini karena indikator utama efektivitas, yaitu tercapainya tujuan program kepada kelompok sasaran yang tepat, masih belum terpenuhi secara optimal. Masih adanya kesalahan sasaran, yaitu masyarakat mampu yang ikut menikmati subsidi, serta potensi hambatan secara teknis, yaitu masyarakat yang seharusnya berhak namun mengalami kesulitan akses akibat keterbatasan stok atau keterlambatan penyaluran, menjadi bukti bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara maksimal

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Ketepatan Sasaran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tambak Anyar Ilir, ketepatan sasaran penyaluran Gas LPG 3 kg dapat dianalisis menggunakan teori persepsi dari Jalaludin Rakhmat yang menjelaskan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor struktural dan faktor fungsional.

a. Faktor Struktural

1) Sistem Distribusi dan Pendataan NIK/KTP

Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa subsidi Gas LPG 3 kg hanya diterima oleh masyarakat yang berhak, seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil/mikro. Namun, berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem ini di lapangan belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya transparansi dalam proses pendataan serta adanya praktik penggunaan kartu pengambilan yang harus ditebus oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan yang dirancang secara formal dengan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga tujuan untuk membatasi akses belum sepenuhnya tercapai.

2) Kurangnya Pengawasan

Pengawasan dari pihak terkait, baik pemerintah desa maupun pihak distribusi, masih belum dilakukan secara maksimal. Hal ini akhirnya memberikan ruang bagi terjadinya penyimpangan, seperti pembelian subsidi Gas LPG 3 kg dalam jumlah besar oleh pengecer maupun oleh masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori penerima subsidi. Ketidakefektifan pengawasan ini menyebabkan kebijakan yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara konsisten di lapangan.

3) Keterbatasan Pasokan dan Keterlambatan Penyaluran

Dalam beberapa kondisi, distribusi Gas LPG 3 kg ke

pangkalan tidak berlangsung secara rutin dan terkadang mengalami keterlambatan, bahkan hanya datang satu kali dalam sebulan. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat yang tinggi dengan ketersediaan Gas LPG 3 kg dilapangan. Akibatnya, masyarakat harus bersaing untuk mendapatkan Gas LPG 3 kg, yang pada akhirnya memicu antrian panjang serta memperbesar peluang terjadinya praktik pembelian dalam jumlah besar.

4) Perbedaan Harga antara Pangkalan dan Pengecer

Harga gas LPG 3 kg yang relatif lebih rendah dipangkalan dibandingkan ditingkat pengecer mendorong pihak tertentu untuk membeli dalam jumlah besar dan menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini tidak hanya mengganggu distribusi, tetapi juga mengurangi kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan untuk memperoleh subsidi gas dengan harga yang semestinya.

5) Sosialisasi Kebijakan yang belum Optimal

Meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh aparat desa, sosialisasi yang ada dinilai belum berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Bahkan dalam beberapa kasus, sosialisasi tidak fokus pada pemahaman kebijakan, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan penggunaan Gas LPG 3 kg. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan penggunaan

Gas LPG 3 kg menyebabkan masih adanya penyalahgunaan, baik oleh masyarakat yang mampu maupun oleh pihak pengecer. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat, tetapi juga pada sejauh mana informasi tersebut dipahami oleh Masyarakat.

b. Faktor Fungsional

1) Kebutuhan Ekonomi Masyarakat

Gas LPG 3 kg telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat, baik untuk keperluan rumah tangga maupun usaha kecil. Tingginya ketergantungan terhadap subsidi gas ini menyebabkan permintaan yang besar, tidak hanya dari masyarakat kurang mampu, tetapi juga dari masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu. Keinginan untuk memperoleh harga yang lebih murah mendorong sebagian masyarakat mampu untuk tetap menggunakan LPG 3 kg, sehingga mengganggu ketepatan sasaran distribusi.

2) Pengalaman Masyarakat dalam memperoleh Gas LPG 3 kg

Masyarakat yang mengalami kemudahan dalam memperoleh subsidi gas LPG 3 kg cenderung menilai bahwa distribusi sudah berjalan dengan baik. Sebaliknya, masyarakat yang sering mengalami antrian panjang, keterlambatan pasokan, atau kesulitan mendapatkan Gas LPG 3 kg cenderung memiliki persepsi negatif terhadap ketepatan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman langsung memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang masyarakat

terhadap kebijakan.

3) Kepentingan para Pengecer

Pengecer memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dengan membeli Gas LPG 3 kg dalam jumlah besar dari pangkalan, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Praktik ini secara tidak langsung menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam distribusi, karena Gas LPG 3 kg yang seharusnya langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, justru beralih ke tangan pihak lain terlebih dahulu untuk kepentingan mereka.

4) Tingkat Kesadaran Masyarakat

Sebagian masih adanya masyarakat mampu yang tetap membeli Gas LPG 3 kg menunjukkan bahwa kesadaran terhadap tujuan subsidi belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini berkaitan dengan aspek moral dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam menggunakan fasilitas subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.

Ketidaktepatan sasaran penyaluran Gas LPG 3 kg di Desa Tambak Anyar Ilir merupakan hasil interaksi antara faktor struktural dan faktor fungsional, seperti lemahnya pengawasan, sistem pendataan yang belum optimal, keterbatasan pasokan, serta perbedaan harga antara pangkalan dan pengecer, dan juga kurangnya pemahaman masyarakat dalam kebijakan pendistribusian. Sementara itu, dari segi faktor fungsional,

seperti tingginya kebutuhan ekonomi masyarakat, pengalaman dalam memperoleh gas, kepentingan ekonomi pengecer, serta rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap tujuan subsidi.

3. Berdasarkan Kriteria Penerima Bantuan

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Tambak Anyar Ilir menunjukkan bahwa penyaluran Gas LPG 3 Kg bersubsidi masih belum sepenuhnya mencapai kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Meskipun program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro, pada kenyataannya masih ditemukan warga yang tergolong mampu turut memanfaatkan subsidi tersebut. Di sisi lain, sebagian masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat justru mengalami kesulitan dalam mengakses LPG 3 Kg. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 yang menjelaskan bahwa bantuan sosial diprioritaskan bagi rumah tangga miskin yang memenuhi indikator tertentu, seperti tingkat pendapatan yang rendah, kondisi tempat tinggal yang sederhana, keterbatasan sarana sanitasi, serta minimnya kepemilikan aset bernilai ekonomi.

Apabila dibandingkan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan, terlihat adanya perbedaan antara ketentuan yang berlaku dan pelaksanaan distribusi di tingkat masyarakat. Keberadaan warga dengan kondisi ekonomi yang relatif baik namun masih dapat membeli LPG 3 Kg menunjukkan bahwa proses penyaluran belum mampu membedakan

secara optimal antara kelompok yang berhak dan yang tidak berhak menerima subsidi. Padahal, kebijakan subsidi energi ini pada dasarnya diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat miskin dan pelaku usaha mikro. Penerapan sistem pendataan melalui KTP atau NIK sebenarnya merupakan langkah yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan akurasi sasaran penerima, namun pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum mampu menutup peluang terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan kriteria penerima bantuan sosial sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Sosial tersebut, individu atau rumah tangga yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik, pekerjaan tetap, tempat tinggal yang layak, serta aset produktif seharusnya tidak termasuk dalam kelompok penerima subsidi. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa harga LPG 3 Kg yang relatif lebih murah dibandingkan gas nonsubsidi, ditambah dengan lemahnya pengawasan dan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan LPG bersubsidi, menyebabkan kelompok yang tidak memenuhi kriteria tetap dapat mengaksesnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga menyangkut efektivitas pengawasan dan pengendalian distribusi pada tingkat pangkalan maupun pengecer.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap ketepatan sasaran penyaluran LPG 3 Kg banyak dipengaruhi oleh pengalaman mereka saat memperoleh gas tersebut. Masyarakat yang dapat membeli LPG dengan

mudah cenderung menilai distribusi telah berjalan dengan baik. Sebaliknya, masyarakat yang sering menghadapi antrean panjang, keterlambatan pasokan, atau keterbatasan stok lebih banyak menilai bahwa penyaluran LPG 3 Kg masih belum tepat sasaran. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan subsidi tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan yang mengatur sasaran penerima, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana kebijakan dalam memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria kemiskinan sebagaimana telah ditetapkan pemerintah.

4. Implementasi Penyaluran Gas LPG 3 kg dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam kajian ekonomi syariah, pengelolaan dan penyaluran sumber daya publik, termasuk subsidi gas LPG 3 kg, tidak terlepas dari konsep *maqasid syariah* sebagai tujuan utama syariat. Konsep ini menekankan perlindungan terhadap lima aspek mendasar kehidupan, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Hisyam, 2024). Dalam konteks ini, kebijakan subsidi LPG 3 kg merupakan bentuk peran negara dalam menjaga aspek harta, khususnya melalui upaya pemerataan akses energi dan pencegahan kerugian bagi masyarakat yang membutuhkan.

Akan tetapi, hasil penelitian di Desa Tambak Anyar Ilir menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip yang diharapkan. Masih ditemukan berbagai persoalan, seperti penyaluran yang belum tepat sasaran, adanya perbedaan harga yang tidak

terkendali, serta lemahnya pengawasan dalam distribusi. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menelaah fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang didukung oleh dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama, guna menilai kesesuaian praktik di lapangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

a. Prinsip keadilan (*al-'adl*) dalam penyaluran

Keadilan distribusi merupakan pondasi Ekonomi Syariah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Hasyr ayat (7):

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Ayat tersebut menegaskan larangan penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak serta menuntut adanya pemerataan, agar tercapai kesejahteraan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam konteks subsidi Gas LPG 3 kg, kebijakan ini pada dasarnya ditujukan untuk melindungi rumah tangga berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Hal tersebut sejalan dengan konsep distribusi dalam ekonomi Islam, seperti zakat dan infak yang berfungsi sebagai mekanisme pemerataan, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Ihya Ulumuddin*, yaitu untuk menekan terjadinya kemiskinan yang bersifat struktural.

Namun, hasil penelitian di Desa Tambak Anyar Ilir memperlihatkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya. Subsidi yang seharusnya dinikmati oleh kelompok rentan justru masih diakses oleh masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih baik, sehingga mengurangi hak penerima yang semestinya. Kondisi ini mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi. Dampaknya, distribusi menjadi tidak merata, berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, dan tidak sejalan dengan tujuan *maqasid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), serta dapat memicu ketegangan di tengah masyarakat.

b. Amanah dan tanggung jawab dalam pengawasan (*hisbah*)

Amanah adalah kewajiban mutlak dalam muamalah syariah yang mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap transaksi ekonomi dan interaksi sosial (Siregar, 2024). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, An-Nisa Ayat (58):

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Hisbah dapat diartikan juga sebagai lembaga yang fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran (Hamid, 2019). Hisbah berfungsi untuk menghindari praktik ketidakjelasan (*hgarar*), kecurangan (*tadlis*), serta penyimpangan dalam penetapan harga, dengan peran pengawasan dijalankan oleh otoritas atau pemerintah.

Di Desa Tambak Anyar Ilir, lemahnya nilai amanah dapat dilihat dari kecenderungan pangkalan yang lebih mengutamakan penjualan kepada pengecer dalam jumlah besar dengan harga lebih tinggi, serta kurangnya pengawasan dari pihak desa. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi *hisbah* dalam konteks saat ini, di mana pangkalan sebagai agen negara belum mampu menyalurkan subsidi secara tepat sasaran. Kejujuran dalam pendataan (*shiddiq* dan transparansi)

Shiddiq (kejujuran) adalah sifat mulia yang berarti benar, jujur, atau nyata, di mana perkataan, perbuatan, dan niat hati seseorang sesuai dengan kenyataan atau fakta (Sari et al., 2024). Dalam proses penyaluran, keterbukaan data berbasis NIK/KTP menjadi hal penting untuk mencegah terjadinya manipulasi, sejalan dengan prinsip *i'tidal* (keseimbangan) dalam fiqh muamalah. Pandangan masyarakat di Desa Tambak Anyar Ilir yang menilai pendataan belum transparan menunjukkan bahwa sistem tersebut belum berjalan dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data.

5. Keterkaitan Temuan Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian di Desa Tambak Anyar Ilir memperlihatkan adanya keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu, terutama mengenai efektivitas penyaluran subsidi serta perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam distribusi LPG 3 kg. Persepsi masyarakat yang muncul dalam penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa persoalan distribusi tidak hanya berkaitan dengan aturan administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik di lapangan.

a. Keterkaitan penelitian dengan penelitian terdahulu Inayatni, (2024)

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian (Inayatni, 2024) yang membahas distribusi gas LPG 3 kg dari sudut pandang Etika Bisnis Islam. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa walaupun prosedur penyaluran secara administratif telah mengikuti

aturan, pada praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan perilaku pelaku distribusi. Temuan di Desa Tambak Anyar Ilir juga menunjukkan kondisi serupa. Beberapa informan, seperti Ibu Rusdah dan Bapak Hamsani, menyampaikan bahwa terdapat pangkalan yang lebih mengutamakan penjualan dalam jumlah besar kepada pengecer dibandingkan masyarakat biasa. Praktik tersebut menyebabkan masyarakat sering tidak memperoleh gas meskipun di pangkalan dinyatakan stok habis. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa persoalan utama distribusi bukan hanya terletak pada aturan, tetapi juga pada sikap tanggung jawab dan amanah pihak penyalur dalam menjalankan subsidi.

Penelitian (Inayatni, 2024) juga menegaskan bahwa pengalaman langsung masyarakat sangat memengaruhi cara mereka memandang suatu kebijakan. Hal yang sama terlihat dalam penelitian ini, di mana pengalaman masyarakat saat mengantre panjang, sulit mendapatkan stok, hingga harus membeli gas di pengecer dengan harga lebih mahal membentuk pandangan bahwa penyaluran LPG 3 kg belum berjalan secara tepat sasaran. Pengalaman tersebut turut memunculkan keraguan masyarakat terhadap efektivitas sistem pendataan NIK/KTP. Meskipun kebijakan tersebut bertujuan memperjelas data penerima subsidi, sebagian masyarakat menilai sistem itu belum mampu mencegah

praktik pembelian dalam jumlah besar oleh pengecer karena pengawasan yang masih lemah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan (Inayatni, 2024) terkait rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap tujuan subsidi. Di Desa Tambak Anyar Ilir masih ditemukan warga yang tergolong mampu tetap menggunakan LPG 3 kg bersubsidi. Selain itu, adanya kepentingan ekonomi pengecer untuk memperoleh keuntungan lebih besar dari penjualan kembali gas subsidi turut memengaruhi ketidaktepatan sasaran distribusi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian sasaran penyaluran LPG 3 kg dipengaruhi oleh kombinasi antara lemahnya pengawasan dan rendahnya tanggung jawab sosial sebagian pelaku distribusi maupun masyarakat. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan distribusi subsidi tidak hanya bergantung pada sistem administrasi, tetapi juga pada pengawasan dan kesadaran moral dalam pelaksanaannya.

b. Keterkaitan penelitian dengan penelitian terdahulu Ahdan, (2022)

Hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat Desa Tambak Anyar Ilir terhadap ketepatan sasaran penyaluran gas LPG 3 kg memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahdan (2022). Kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa meskipun prosedur distribusi telah mengikuti aturan yang berlaku, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Penelitian Ahdan di Kelurahan Tirta Siak menemukan adanya ketidaksesuaian harga serta keterbatasan pasokan gas. Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Tambak Anyar Ilir, di mana masyarakat memahami bahwa penggunaan KTP/NIK bertujuan untuk menertibkan distribusi, tetapi pada praktiknya masih terjadi pembelian oleh pengecer dari pangkalan dan harga jual di tingkat pengecer jauh melebihi HET. Hal ini menunjukkan bahwa aturan administratif saja belum cukup untuk menjamin penyaluran subsidi berjalan tepat sasaran tanpa adanya pengawasan yang kuat.

Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, penelitian Ahdan, (2022) menyoroti belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dalam distribusi LPG 3 kg. Temuan tersebut juga terlihat di Desa Tambak Anyar Ilir, ketika masyarakat mampu dan pengecer masih dapat memperoleh gas bersubsidi yang seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Antrean panjang, stok yang cepat habis, serta distribusi yang terkadang terlambat menimbulkan kesan bahwa akses terhadap LPG 3 kg belum merata. Selain itu, kurangnya keterbukaan dalam pendataan NIK/KTP memperlihatkan belum optimalnya penerapan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam proses distribusi.

Penelitian Ahdan, (2022) juga menekankan pentingnya perilaku pelaku distribusi dalam menentukan keberhasilan penyaluran subsidi. Di Desa Tambak Anyar Ilir, kondisi ini terlihat dari adanya

pengecer yang membeli gas dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi tetap menggunakan LPG 3 kg demi menghemat pengeluaran. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa nilai kepedulian sosial dan kesadaran untuk tidak mengambil hak masyarakat lain belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum, kedua penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan subsidi LPG 3 kg untuk membantu masyarakat kecil belum sepenuhnya tercapai. Keterlambatan distribusi, tingginya harga di tingkat pengecer, serta lemahnya pengawasan menjadi hambatan utama dalam mewujudkan penyaluran yang adil dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih efektif dan pelaksanaan distribusi yang lebih transparan agar manfaat subsidi benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

- c. Keterkaitan penelitian dengan penelitian terdahulu Ramadhania, (2018)

Hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat Desa Tambak Anyar Ilir terhadap ketepatan sasaran penyaluran gas LPG 3 kg menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat dengan penelitian Ramadhania (2018). Kedua penelitian sama-sama menemukan

bahwa meskipun distribusi LPG 3 kg telah mengikuti prosedur pemerintah, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait perbedaan harga dan lemahnya pengawasan distribusi.

Dalam penelitian Ramadhania di Kelurahan Bantaya, ditemukan bahwa kurangnya pengawasan menyebabkan harga LPG 3 kg di tingkat pengecer tidak sesuai dengan ketentuan resmi. Kondisi serupa juga terjadi di Desa Tambak Anyar Ilir, di mana lemahnya pengawasan dari aparat desa maupun pihak terkait membuka peluang bagi pengecer untuk membeli gas dalam jumlah besar dan menjual kembali dengan harga lebih tinggi dari HET. Perbedaan harga antara pangkalan dan pengecer tersebut menjadi salah satu penyebab terganggunya pemerataan distribusi subsidi kepada masyarakat yang berhak.

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, penelitian Ramadhania menegaskan bahwa distribusi LPG 3 kg belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Temuan yang sama terlihat dalam penelitian ini, ketika masyarakat menilai masih banyak warga yang tergolong mampu ikut menikmati gas bersubsidi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah dalam penyaluran subsidi belum berjalan optimal. Selain itu, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk beralih ke gas non-subsidi serta dorongan ekonomi pengecer untuk memperoleh

keuntungan lebih besar turut memengaruhi ketidaktepatan sasaran distribusi.

Kedua penelitian juga memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kestabilan pasokan dan keterbukaan sistem distribusi. Di Desa Tambak Anyar Ilir, lemahnya pengawasan berdampak pada antrean panjang, keterbatasan stok, serta keterlambatan distribusi yang kemudian membentuk persepsi masyarakat bahwa penyaluran LPG 3 kg belum berjalan secara adil. Walaupun sistem NIK/KTP telah diterapkan untuk memperbaiki pendataan penerima, pelaksanaannya dinilai belum maksimal karena masih adanya kendala pengawasan dan sosialisasi yang kurang optimal.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperkuat temuan Ramadhania bahwa ketidaktepatan sasaran distribusi LPG 3 kg tidak hanya disebabkan oleh masalah administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, kepentingan ekonomi, dan rendahnya kesadaran sosial masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan yang lebih konsisten serta peningkatan kesadaran masyarakat agar distribusi LPG 3 kg dapat berjalan lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah